

Faktor-Faktor yang Mendukung Terpilihnya Pasangan Calon Bupati Nurdin Basirun dan Wakil Bupati Aunur Rafiq pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2011

**Oleh: Getha Putri Oktaria Harahap
Muchid S.sos M.Phil**

**Getha_putri@yahoo.co.id
082390985550**

ABSTRACT

This research describe about the factors that support selected Nurdin Basirun and Aunur Rafiq as a head regency and vice of head Karimun Regency Riau Archipelago Province in 2006-2011. In election district head in Karimun Regency were the contestant are Nurdin Basirun and Aunur Rafiq and also Syamsuardi and Suryaminsyah. The district head election in 2011 ago have a result a Nurdin Basirun and Aunur Rafiq be a head regency and vice of head regency of Karimun Regency the second periode with the totally voice around 92%.

The methods of this research are qualitative descriptive methods that as a process analyze the problem research with describe the subject and object research based on the empirical fact. The location of this research in Karimun Regency and researcher collect data from the books, government rules, journal, mass media, website and also deep interview with informan research such as success team, Karimun Commission Election and society.

The conclusion of this research are there are many factors that support selected Nurdin Basirun and Aunur Rafiq as a head regency and vice of head Karimun Regency such as popularity factor, attitude factor, charisma factor, leadership factor rational political choice factor, political party factor and psychology factor.

Keyword: *district head, elections, kepala daerah, pilkada, voting behavior.*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq dalam pilkada di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karimun tahun 2011. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq dalam pilkada di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka teori dibutuhkan peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah teori pemilihan kepala daerah dan teori perilaku pemilih dan digunakan sebagai kerangka acuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan kehidupan yang demokratis. Menurut kamus istilah Politik dan kewarganegaraan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan seperti ini rakyat yang memegang kekuasaan yang sepenuhnya dan yang menjalankan sistem pemerintahan itu adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Pricles mengemukakan criteria demokrasi terdiri dari: 1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi penuh dan langsung 2) Kesamaan warga Negara di depan hukum 3) Adanya pluralism, penghargaan atas perbedaan 4) penghargaan terhadap pribadi untuk mengekspresikan kepribadian individu (Asari; 2006. 46)

Alwis juga mengatakan pentingnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis adalah karena prinsip demokrasi, setiap pejabat public yang merupakan jabatan politis harus dipilih secara langsung sebagai mekanisme akuntabilitas jabatan politis dan kontrak politik antara rakyat dengan pemimpinnya, sehingga upaya untuk menciptakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat direalisasikan (Alwis; 2005. 2).

Ramlan Subakti mengatakan pemilihan adalah sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Surbakti; 1992. 152). Menyangkut masalah pemilihan kepala daerah secara langsung sedikit banyak mencerminkan bahwa pilihan rakyat merupakan kedaulatan kembali ke asalnya, rakyatlah yang berhak menentukan kemauannya siapa yang pantas menjadi penyelenggara di daerah. Sedangkan SH Sarundjang menyebutkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah salah satu kebijakan pemerintah yang menandai berlangsungnya babak baru sistem pemerintah daerah, tetapi juga sebagai seorang pemimpin bagi masyarakat daerah (Sarundjang; 2005. 17).

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung ini merupakan pondasi menuju terciptanya *check and balance* yang efektif terhadap kepala daerah. Dengan cara ini maka kepala daerah akan merasakan langsung akan legitimasi kekuasaan yang datang dari tangan rakyat. Daniel S Paringga mengatakan bahwa pemilihan secara langsung oleh rakyat dipahami sebagai institusi politik yang meningkatkan kualitas demokrasi yang bersandar pada dua pilar yaitu parlemen dan civil liberties. Pilar civil liberties membuat rakyat mengambil posisi aktif dari waktu ke waktu dalam berbagai proses politik.

Hubungan antara pilkada langsung dengan kedaulatan rakyat adalah adanya kekuasaan dari rakyat untuk menentukan kepala daerahnya. Oleh karena itu pilkada langsung memiliki beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut (Priatmoko; 2005. 78):

1. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
2. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terkait pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, kepala daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali besebrangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah daerah seringkali adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
3. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislative atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon.

Apabila kepala daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.

4. *Checks and balance* antara lembaga legislative dan eksekutif dapat lebih seimbang.
5. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Setelah melihat kelebihan pilkada langsung, maka terdapat beberapa kelemahan terhadap pemilihan kepala daerah langsung yang antara lain sebagai berikut (*Ibid.* 76):

1. Dana yang dibutuhkan sangat besar

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistic maupun keamanan. Besarnya dana untuk pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (*Two Round* atau *Run-off sistem*), ditengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

2. Membuka kemungkinan konflik elite dan massa

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam pilkada langsung bisa bersifat elite namun lebih besar kemungkinannya bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antar masa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistic dan primordial, dimana pemimpin (Patron) dapat memobilisas pendukungnya (*client*).

3. Aktivitas rakyat terganggu

Kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyasati kampanye para calon, namun juga energy dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan maneuver-manuver yang dilakukan para calon.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dukungan partai politik juga sangat menentukan. Selain untuk memenangkan pasangan calon yang diusungkan dalam pemilihan kepala daerah, partai politik juga harus bekerja keras untuk mengumpulkan dukungan, agar dapat menarik simpatik masyarakat untuk memilih pasangan calon yang mereka dukung.

Di beberapa negara yang demokratis menurut Miriam Budiardjo, partai politik juga memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi Politik
2. Partai politik sebagai sarana sosialisai politik
3. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
4. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Dari keempat fungsi partai politik, fungsi inilah yang paling menentukan dalam mendukung pasangan calon. Karena partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk turut ikut aktif dalam kegiatan politik (Budiardjo; 2000. 63).

Selain keempat fungsi diatas partai politik harus memiliki dasar kuat dan dapat diandalkan. Karena partai politik merupakan kendaraan yang ditunggangi oleh pasangan calon untuk dapat masuk dan berlaga dalam pesta demokrasi. Jadi dengan kata lain partai politik harus mempunyai pengalaman yang dapat membuatnya berbeda dari partai politik yang lain dan harus memiliki infrastruktur yang baik dan terpusat sehingga memudahkan jalannya untuk dapat memimpin partai dan berkompetisi dengan partai lain untuk menduduki jabatan terpenting dipemerintahan.

Keikutsertaan dalam pemberian suara sudah dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menurut Michael Rush dan Philip Altholf merupakan keterlibatan yang paling minimal yang akan berhenti apabila pemberian suara telah terlaksanakan (Rush dan Altholf; 2005. 127). Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Penelitian ini difokuskan pada teori perilaku pemilih. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan satu hal yang paling menarik adalah tentang perilaku pemilih pada saat pemilihan, karena perilaku muncul ketika pemilihan dilaksanakan. Perilaku pemilih selalu berkaitan dengan budaya politik. Karena budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Almond dan Powell berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber pada perilaku lahiriah dari manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar (Syarbani; 2002. 66).

Mengenai perilaku pemilih, Alwis mengemukakan bahwa pada intinya konsep voting itu berhubungan dengan pemberian suara dari individu sebagai anggota kelompok (warga masyarakat) dalam rangka menggunakan haknya untuk berpartisipasi didalam pemilu atau penentuan kebijaksanaan public. Dan alwis juga

menyebutkan bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep voting behavior (Alwis; 1997. 22).

Dalam menyoroiti *Voting Behaviour* atau perilaku pemilih ini ada tiga pendekatan yang dapat menjelaskan atau memprediksikan tentang perilaku pemilih ini antara lain Pertama, *Teori Party Identification*. Teori ini dikenal dengan Michigan Model (1997) yang menjelaskan bahwa pemilih mengidentifikasi diri dalam partai yang mereka dukung, sebagai democrat atau republican, lalu memberikan kepada kandidat yang mereka diusung partainya tersebut. Dengan kata lain bahwa pemilih akan mempresepsikan diri mereka sendiri sebagai warga GOLKAR, warga PKS, warga PKB, warga PDIP dan lan-lain.

Kedua, *Social Loyalty*. Teori ini dikenal dengan model Eropa yang mengatakan variable identitas social, social identity adalah factor lain penentu perilaku pemilih dalam pemilihan. Menurut teori ini pemilihan tidak lebih sebagai alat penegasan pemilih *Voters Affirmation* terhadap loyaltas tertentu seperti agama, etnisitas komunitas dimana mereka dilahirkan atau kesamaan profesi dan lain-lain.

Ketiga, *Teori Kompetensi dan Integritas Calon*. Di Negara-negara maju dan demokrasi mapan, perilaku pemilih telah bergesar. Pemilih lebih tertarik pada kualitas kandidat yang berlaga di pemilihan, atau isu kampanye yang dikomunikasikan pasangan calon, tanpa mempersoalkan identitas social kandidat. Dari sini dapat kita lihat bahwa rasionalitas dan idealism mulai berperan. Pergeseran perilaku pemilih tersebut distimulan oleh peran media massa, cetak atau elektronik yang sangat efektif mensuplai berbagai informasi penting tentang kandidat dan pemilihan (Ibrahim; 2007. 1).

Berdasarkan penjelasan diatas, banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini diharapkan agar kita dapat memprediksikan perilaku pemilih secara cepat dan akurat. Teori tentang perilaku ini dapat kita lihat pada fenomena perilaku social, termasuk penelitian tentang perilaku dalam pemilihan presiden di Amerika yaitu *Theory of Planed Behaviour* dari Icek Ajzen yang dikemukakan oleh H Gusti Farid Hasan. Teori ini mengemukakan bahwa selain factor sikap, faktor norma subjektif dan factor kepemimpinan juga dapat mempengaruhi secara langsung perilaku pemilih (Afriadi; 2005. 22).

Hasil dan Pembahasan

Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto menuju arah Reformasi di Indonesia, maka terjadi perubahan yang cukup besar dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Pada masa orde baru sistem pemerintahan Indonesia lebih kearah demokrasi terpusat yang akibat dari kekuasaan yang terpusat ini, maka timbullah ketidakmandirian dari masyarakat. Dan sampai pada tahun 1998 dengan perubahan kearah Reformasi mendorong terjadinya perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi kepada desentralisasi.

Dengan perkembangan otonomi daerah berupa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri mengakibatkan banyak daerah yang menginginkan adanya pemekaran di wilayah Kabupaten masing-masing. Keinginan untuk memekarkan Kabupaten tersebut merupakan perwujudan dari perlawanan terhadap sistem kekuasaan pemerintahan yang otoriter selama masa orde baru.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “ Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Jadi dengan pelaksanaan pemilihan yang demikian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kepala daerahnya secara demokrasi.

Perkembangan sistem pilkada secara langsung ini mendorong aktor politik untuk berperan serta dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah, hal ini terlihat dari keikutsertaan aktor politik secara langsung dan menyatakan mereka mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang akan dilaksanakan setelah setelah mengetahui kesiapan Komisi Pemilihan Umum daerah untuk menggelar pemilihan kepala daerah.

Fenomena mengenai pemilu presiden dan pilkada di beberapa daerah di Indonesia inilah yang juga digambarkan diatas terjadi di Kabupaten Karimun yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, keunikan dari wilayah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2011 tersebut adalah tingkat perolehan suara yang sangat tinggi yang diperoleh oleh pasangan calon Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun adalah kabupaten yang hasil pemekaran dari Kabupaten Kepri (Bintan) pada tahun 1999. Teritorial Karimun meliputi luas 6.984 km² dengan luas daratan 1.524 km² dan lautan seluas 4.760 km² yang terdiri dari 198 pulau. Jumlah penduduk di Kabupaten Karimun hingga saat ini mencapai 205.438 jiwa tersebar dengan kelompok etnis yang berbeda.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administratif Kabupaten Karimun awalnya merupakan wilayah kerja

Pembantu Bupati Wilayah II Karimun yang terdiri dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Setelah terbentuknya DPRD Kabupaten Karimun, melalui Perda Nomor 16 Tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 kecamatan, yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Karimun
2. Kecamatan Meral
3. Kecamatan Tebing
4. Kecamatan Buru
5. Kecamatan Kundur
6. Kecamatan Kundur Utara
7. Kecamatan Kundur Barat
8. Kecamatan Moro
9. Kecamatan Durai

Sampai dengan saat ini, Kabupaten Karimun telah melakukan tiga kali pemilihan kepala daerah sejak tahun 2003, 2006 dan 2011. Pada tahun 2003 Bupati pertama yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun adalah pasangan Drs. H. M. Sani dan Nurdin Basirun. Setelah berjalan beberapa tahun kepemimpinan Bupati Drs. H.M. Sani maka pada tahun 2004 Drs. H. M. Sani terpilih menjadi Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Pasca terpilihnya Bupati Karimun menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Riau, maka secara otomatis Nurdin Basirun naik menjadi Bupati Karimun dan sampai pada tahun 2006 dilaksanakan kembali pilkada secara langsung di Kabupaten Karimun dan pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode I.

Selama 5 tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq maka terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan. Sesuai dengan visi dan misinya pada saat pilkada tahun 2006 maka pembangunan yang dilakukan cukup terasa di masyarakat. Tabel berikut ini merupakan perbandingan pembangunan Kabupaten Karimun dibidang kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana pada saat sebelum dan sesudah pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq.

Setelah berjalan 5 tahun periode kepemimpinan pertama, pada tahun 2011 kembali digelar pilkada langsung di Kabupaten Karimun yang pada saat itu diikuti oleh dua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan pertama adalah pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq serta pasangan kedua adalah pasangan Syamsuardi-Syuryaminsyah. Dalam pilkada langsung pada tahun 2011 tersebut pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq terpilih kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun periode II.

Berdasarkan data resmi Desk Pilkada Kabupaten Karimun, maka untuk perolehan suara pada pilkada tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tabel Perolehan Suara Pilkada langsung Kab. Karimun

| No | Pasangan Pemenang | Perolehan Suara | Persentase |
|-------|------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | Nurdin Basirun – Aunur Rafiq | 84.785 suara | 92,18% |
| 2 | Syamsuardi – Suryaminsyah | 6.954 suara | 7,82% |
| Total | | 91.739 suara | 100% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011

Selain itu, berdasarkan Data Desk Pilkada Karimun juga menunjukkan bahwa dari total jumlah pemilih di Kabupaten Karimun yaitu 166.783 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilihan Tetap (DPT), maka jumlah warga yang menggunakan hak pilih mencapai 91.739 orang dan jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 75.044 atau persentase pemilih mencapai 55,01% (KPUD Karimun. 2011).

Terpilihnya kembali pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq menjadi Bupati Karimun periode II tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pasangan tersebut. Pada periode pertama berdasarkan pengamatan peneliti, pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq dinilai cukup berhasil dimata masyarakat Kabupaten Karimun pada periode pemerintahan 2006-2011. Secara fisik pembangunan di Kabupaten Karimun telah nampak bertambah dan berkembang pesat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana umum.

Faktor pendukung terpilihnya kembali pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq untuk yang kedua kalinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun selain didukung oleh program kerja juga didukung oleh popularitas calon Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq yang lebih memiliki popularitas dimata masyarakat. Hal ini tentu saja dikarenakan oleh pasangan Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq merupakan calon *incumbent*.

Masyarakat di Kabupaten Karimun terdiri dari berbagai macam etnis antara lain Melayu, Tionghua, Minang, Jawa dan Batak. Selain itu adanya dua pasangan calon kepala daerah, penulis berasumsi bahwa dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun ini dapat menimbulkan banyaknya calon kepala daerah. Bukan saja pengaruh dari banyaknya etnis, dengan banyak partai politik juga sangat mempengaruhi. Karena partai politik mempunyai wewenang untuk mencalonkan siapa yang mereka anggap dapat menjalankan persamaan visi dan misi dari partai politik yang mereka dukung serta dapat memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung memang tidak terlepas dari kelemahan dan kelebihannya. Karena sebaik apapun pelaksanaan yang telah direncanakan, pasti masih ada saja yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya dilapangan. Begitu juga pelaksanaan yang terjadi di Kabupaten Karimun. Suhu

politik di Kabupaten Karimun menjelang pemilihan kepala daerah pada tahun 2011 benar-benar semakin panas.

Sejak menjabat menjadi Wakil Bupati tahun 2003 dan pada tahun 2006 menjadi Bupati di Kabupaten Karimun, Nurdin Basirun terkenal sangat dekat dengan masyarakatnya, hal ini terbukti dengan seringnya Nurdin Basirun berkumpul bersama dengan masyarakatnya sambil minum kopi dan bermain domino sambil mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Selain itu Nurdin Basirun juga sering membantu masyarakat yang mengalami kesusahan, karena menurut Nurdin beliau juga berasal dari keluarga sederhana, sehingga beliau paham betul dengan apa yang dirasakan masyarakatnya dan memiliki tekad untuk membangun wilayahnya serta menurunkan tingkat angka kemiskinan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karimun tahun 2011 dimenangkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq dengan perolehan suara mutlak sekitar 92% suara
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nurdin Basirun dan Aunur Rafiq pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karimun tahun 2011 adalah sebagai berikut, yaitu faktor popularitas, faktor kepemimpinan, faktor dukungan politik, faktor sikap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwis M.Si. Jurnal Ilmu Pemerintahan. UNRI No 1 Tahun 1997
- Daniel S Salossa. 2005. *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Secara Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Media Persindo. Yogyakarta.
- Dr. Erans A. 1995 . *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Indah Surabaya.
- Dr. J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* PT. Gramedia Utama. Jakarta.
- DR. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. 2010. *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*. Direktorat Jenderal Hukum Umum.
- Drs syahrial Syabrani, MA dkk .2002. *sosiologi politik*. Gahlia Indonesia Jakarta.
- Joko J Priatmoko. 2005. *Pemilihan Langsung Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mariam Budiarto. 1998 *Dasar-dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Utama. Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Pemilihan Survei* . LP3ES. Jakarta
- Michael rush dan Philip altoff. 2005 *Pengantar sosiologi politik* CV Rajawali, Jakarta.
- Ramlan Subakti. 1992. *Memahami ilmu Politik*. PT Gramedia widiasaran Indonesia. Jakarta.
- SH Surandajang. 2005. *Babak baru system pemerintahan daerah*. Kasta hasta Jakarta.
- Tandjung Akbar. 2010. *Golkar Way*. Pustaka. Jakarta.

Peraturan

- Peraturan pemerintah no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Undang- Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah (pemilihan kepala daerah).